

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan dan evaluasi kerja merupakan salah satu fungsi manajemen yang esensial dalam memastikan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam organisasi swasta, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat operasi bisnis. Melalui mekanisme pengawasan, perusahaan dapat memonitor kinerja karyawan, mengevaluasi implementasi strategi bisnis, dan mendeteksi potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan organisasi maupun usaha yang dijalankan.

Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam mengelola kinerja organisasi di berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintahan. Di tingkat nasional, pengawasan internal dijalankan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan administrasi dan operasional. Sistem pengawasan internal menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan organisasi. Menurut Choirulsyah & Azhar (2024), pengawasan internal merupakan rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengawasan, terutama pengawasan internal di dalam lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawal proses tersebut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan agar pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, ditemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran prosedural, penyimpangan administrasi, hingga turunnya kualitas kinerja aparatur pengawas pemilu (Fachrezi & Nasution, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan internal merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Nias turut serta dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Nias sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di wilayah tersebut memikul tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya beberapa persoalan yang menunjukkan belum optimalnya sistem pengawasan internal di lembaga ini. Di antaranya adalah minimnya monitoring secara berkala, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, serta belum konsistennya evaluasi kinerja terhadap pegawai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas kinerja lembaga secara keseluruhan.

Kinerja pegawai yang tidak maksimal tentu berdampak serius, seperti keterlambatan dalam mendeteksi pelanggaran, meningkatnya potensi manipulasi data, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan internal yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias dalam

rangka meningkatkan kinerja lembaga dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan internal, serta merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat kinerja pegawai dan lembaga secara keseluruhan.

Teori Pengawasan oleh Handoko dikutip dalam Pandibu (2022) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup empat aspek: penetapan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata, perbandingan dengan standar, dan tindakan koreksi. Ini penting untuk menjamin efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), pengawasan internal mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lebih lanjut, Setiawan (2024) dalam bukunya yang berjudul “Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori Dan Praktek,” menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan fondasi dalam memastikan kinerja pegawai yang tinggi, terutama di organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik.

Beberapa penelitian terdahulu juga memberikan gambaran yang mendukung urgensi dari penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Waluyo & Rodiyah (2023) yang berjudul: “Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020,” menemukan bahwa sistem pengawasan internal yang terstruktur mampu meningkatkan kinerja pegawai hingga 35% melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi secara langsung dan berkesinambungan. Selanjutnya penelitian oleh Marwah dkk (2024) yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar." Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap pemantauan berkala dan pelatihan pegawai menyebabkan penurunan efektivitas kinerja pegawai dan staf pendukung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pengawasan internal yang menjadi elemen

penting dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi, khususnya di lembaga pemerintahan seperti Bawaslu. Permasalahan yang ditemukan di Bawaslu Kabupaten Nias, mulai dari lemahnya monitoring berkala hingga kurang optimalnya kinerja pegawai, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan. Selain itu, kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi konteks pengawasan pemilu di wilayah lokal dengan tantangan spesifik seperti geografis, anggaran, dan sumber daya manusia, semakin memperkuat urgensi penelitian ini.

Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian "**Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024**," sebagai upaya memberikan solusi strategis yang berbasis ilmiah bagi penguatan pengawasan internal demi mendukung keberhasilan Pilkada Serentak di masa-masa mendatang.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Nias dalam meningkatkan kinerja selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis sejauh mana sistem pengawasan internal mampu mendukung keberlangsungan tugas pengawasan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan strategi perbaikan yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam meningkatkan kinerja selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam penerapan sistem pengawasan internal?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam meningkatkan kinerja selama Pilkada Serentak 2024.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nias dalam pelaksanaan sistem pengawasan internal.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai efektivitas sistem pengawasan internal dalam meningkatkan kinerja pegawai, khususnya dalam konteks organisasi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan dalam literatur akademik yang membahas hubungan antara pengawasan internal dan kinerja organisasi, terutama dalam sektor pengawasan pemilu.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris bagi peneliti dalam mengevaluasi sistem pengawasan internal, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang implementasi strategi pengawasan yang efektif dalam mendukung kinerja organisasi pemerintahan.

2) Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan internal yang ada, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya dalam Pilkada Serentak 2024.

3) Bagi Universitas Nias dan Akademika

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di Universitas Nias untuk mengembangkan kajian yang relevan dalam bidang manajemen, evaluasi kinerja dan pengawasan, sekaligus memperluas wawasan akademik mengenai tata kelola organisasi publik.

4) Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lanjutan yang ingin mengkaji lebih mendalam topik terkait efektivitas sistem pengawasan internal di sektor pemerintahan atau di wilayah lain. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pengawasan internal dan dampaknya terhadap kinerja organisasi dalam konteks yang lebih luas.